

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah Indonesia diwacanakan dalam lirik lagu berjudul “72” oleh penyanyi *rap hip hop* Papua: Phapin MC. Penelitian ini berfokus pada wacana dominasi dan perlawanan yang dibawakan dalam lagu tersebut. Hal ini menjadi penting karena penulis membahas bagaimana lirik lagu dikonstruksi serta fenomena sosial apa yang melatarbelakangi dibuatnya lagu-lagu tersebut. Dalam menganalisis teks berupa lirik lagu tersebut, peneliti menggunakan analisis wacana kritis milik Norman Fairclough untuk membantu peneliti mengungkap motivasi-motivasi dibalik (*hidden motivations*) sebuah teks (Ida, 2018).

Topik mengenai wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah dalam lirik lagu “72” karya Phapin MC ini menarik untuk diteliti karena disini peneliti melihat adanya wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah yang berusaha dibangun dalam lagu yang berjudul “72” milik Phapin MC tersebut. Signifikansi penelitian ini terletak pada bagaimana wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah dimunculkan dalam lirik lagu. Disamping itu pada saat skripsi ini dibuat, isu soal Papua sedang naik karena adanya kasus rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Dari situ peneliti tergerak untuk mulai meneliti permasalahan tentang Papua. Peneliti kemudian berselancar di internet dan menemukan beberapa musisi yang menelurkan lagu bertemakan perlawanan dan Papua. Salah satu lagu yang peneliti temukan adalah lagu “72” karya Phapin MC. Meskipun lagu tersebut telah dirilis pada tahun 2017 lalu, peneliti menilai bahwa muatan pada lagu tersebut masih menggambarkan seputar fenomena sosial yang aktual hingga kini di Papua, sehingga dapat peneliti gunakan untuk mendalami kondisi-kondisi di Papua termasuk wacana perlawanan yang ada didalam lagu tersebut. Berbeda dengan musisi lainnya, lagu “72” karya Phapin MC

cukup kompleks dan mendalam dalam menggambarkan kondisi di Papua, sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan lagu tersebut dibandingkan dengan lagu lainnya.

Pada karya musik berupa lagu, tak dapat dipungkiri bahwa bahasa memiliki peran sentral sebagai media untuk menyampaikan pesan. Lagu sangat berkaitan erat dengan bahasa karena isi, bentuk dan makna tercipta oleh hubungan bunyi dan kata-kata (Sumartono, 2004). Gagasan yang dibawa oleh si pengarang kemudian dituangkan dengan bahasa menjadi sebuah lirik yang dirangkai dengan kata-kata indah serta puitis, baik tersirat ataupun tersurat. Menurut Semi (1984) pengertian lirik adalah puisi pendek yang mengekspresikan emosi. Lirik dalam lagu berakar dari puisi yang ditulis sebagai perwujudan pengalaman penyair dalam mengungkapkan sikap, perasaan dan aspirasi terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Dalam mengekspresikan sikap, perasaan dan pengalamannya, penyair (dalam hal ini pencipta lagu) melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik serta kekhasan terhadap lirik lagunya. Permainan bahasa ini dapat berupa permainan vokal, gaya bahasa atau penyimpangan makna kata dan diperkuat dengan penggunaan melodi dan notasi musik yang disesuaikan dengan lirik lagunya, sehingga pendengar semakin terbawa dengan apa yang dipikirkan oleh pengarangnya (Awe, 2003).

Menurut Dallin (1994) lirik ditulis sebagai bentuk interaksi antara penulis dan pendengar. Dalam hal ini pencipta lagu membawa pesan-pesan tertentu dengan tujuan memotivasi pendengar, setidaknya untuk berpikir tentang isu yang dibawakan dalam lirik lagu tersebut. Beberapa konsep yang dibawakan oleh pencipta lagu diantaranya adalah menceritakan suatu peristiwa, membawa kesan dan pengalaman serta ungkapan hati pribadi pencipta. Pesan yang terkandung dalam lagu dapat bersifat mengajak, memprovokasi atau memberikan pengetahuan kepada para pendengarnya. Lirik lagu merupakan sebuah media perantara bagi seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, maksud dan makna. Dalam penulisannya, lirik lagu dapat berupa kata-kata yang bermakna tersurat atau tersirat. Makna yang tersirat ini dimunculkan dengan kata-kata bermajas atau perumpamaan. Selain bersinggungan dengan seni, bahasa juga tidak dapat lepas dari politik. Sobur (2004) menyebutkan bahwa berkata – secara lisan atau tertulis – adalah bentuk penyampaian pikiran atau perasaan. Hal inilah yang

secara relatif konsisten kita nyatakan atas masalah-masalah penting dalam kehidupan bersama, itulah politik kita. Dengan demikian, lirik lagu adalah bagian dari bahasa yang memiliki sifat politis, dan memiliki wacana-wacana tertentu didalamnya. Wacana-wacana ini hadir dalam setiap struktur lirik lagu dan dapat membentuk opini, memengaruhi kognisi dan merubah pandangan terhadap sesuatu atau seseorang. Maka dari itulah pemilihan kata dan bahasa menjadi penting dalam membentuk lirik lagu, sekaligus menjadi menarik untuk diteliti karena teks berupa lirik lagu dapat dianalisis sebagai *media discourse*.

Wacana-wacana yang terdapat dalam sebuah lirik lagu bisa beragam jenisnya, salah satunya adalah tentang wacana perlawanan terhadap dominasi yang telah mapan. Berbagai lirik lagu kerap membawakan wacana perlawanan sebagai pesan utama yang disampaikan oleh pencipta lagu. Penelitian bertopik sama mengenai wacana perlawanan dan kritik sosial dengan medium lirik lagu sebelumnya pernah dilakukan oleh Satrio Wibowo dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Satrio adalah lirik lagu dan fokus penelitian. Satrio meneliti tentang kritik sosial pada tiga lagu karya Captain Jack yaitu TV Sampah, Sadar Lebih baik dan Kupu-Kupu Baja. Dalam lirik lagu TV Sampah terdapat kritik tentang tayangan media televisi yang tidak mendidik, dalam lirik lagu Sadar Lebih Baik terdapat kritik budaya minum alkohol dan dalam lirik lagu Kupu-Kupu baja terdapat kritikatas budaya patriarki dalam kondisi sosial di masyarakat.

Perlawanan identik dengan adanya dominasi ideologi (hegemoni) oleh kelas penguasa terhadap kelas yang subordinat. Menurut Scott (1990) perlawanan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh kelompok superdinant terhadap mereka. Menurutnya, perlawanan dilakukan karena adanya penindasan yang terjadi dalam keseharian masyarakat. Perlawanan hadir sebagai bentuk *counter ideology* atau *counter hegemony* yang dirasa tidak sesuai dengan suatu kelompok masyarakat tertentu. Dalam praktiknya, pihak penguasa akan menanamkan ideologi tertentu yang kemudian menjadi hegemoni di suatu negara atau wilayah tertentu.

Hegemoni mengekspresikan persetujuan terhadap otoritas wacana kelompok dominan dalam masyarakat. Hegemoni memiliki hubungan yang erat dengan konsep kekuasaan dan ideologi yang berjalan secara simultan. Hegemoni hanya akan berjalan dengan maksimal jika menggabungkan kedua konsep tersebut. Menurut Gramsci (dalam Sugiono, 1999) kekuasaan yang hanya mengandalkan paksaan (*coercion*) atau fisik, akan menghasilkan suatu bentuk dominasi. Namun jika penguasa ingin melanggengkan kekuasaannya secara terus menerus, maka diperlukan cara-cara yang ideologis, dengan menysasar ranah moral dan intelektual. Maka dari itu hegemoni seperti dalam konsep Gramsci adalah bentuk rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya (Patria dan Arief, 1999).

Dalam artian sederhana, ideologi adalah sistem keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat. Ideologi, seperti yang dikemukakan oleh Marx dalam konteks Revolusi Industri dan pertentangan kelas kala itu, didasari pada gagasan bahwa gagasan-gagasan dominan dalam masyarakat adalah gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh kelas penguasa untuk mengamankan kekuasaannya. Hal ini terjadi karena dominasi ideologi ini berfungsi mempertahankan sistem ketidakselarasan kelas yang umum terjadi, dimana kelas penguasa bisa mendapatkan hak-hak istimewa dan mengeksploitasi kelas-kelas subordinat (Strinanti, 2003).

Dominasi kekuasaan pada akhirnya tak dapat dilepaskan dari bentuk-bentuk represi yang berusaha untuk menekan kelompok subordinat. Tindakan represi ini dapat bersifat menekan, mengekang atau menindas suatu kelompok masyarakat. Pendekatan ini seringkali digunakan dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat menjadi kondusif kembali setelah mengalami *chaos*. Kemunculan gerakan-gerakan sipil di masyarakat yang dinilai sebagai tindakan “melawan hukum” kerap kali direspon dengan pendekatan kekerasan dengan cara-cara yang otoriter. Bentuk-bentuk tindakan represi ini beragam, namun lebih sering dilakukan lewat cara-cara kekerasan dan paksaan oleh aparat seperti kepolisian atau militer. Di Indonesia sendiri pemerintahan yang bersifat represif ini pernah berkuasa selama sekitar 30 tahun. Inkonsistensi dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi telah menyeret

pemerintahan Orde Baru kedalam praktik-praktik pemerintahan pragmatis serta otoriter, sehingga hukum dipertaruhkan demi mengabdikan pada sebuah sistem kekuasaan represif (Huda, 2014). Kebijakan yang bersifat represif ini digunakan untuk mengeliminasi berbagai respon masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Tak heran, kebijakan represif ini sering kali mengakibatkan banyak kasus pelanggaran HAM yang didalangi oleh pemerintah/negara. Maka dari itu, perlawanan digunakan oleh masyarakat yang ter subordinat sebagai alat untuk membela hak-hak yang ada pada diri mereka. Hal-hal yang dianggap menindas mereka lah yang kemudian menjadi alasan bagi kelompok subordinat untuk mempertahankan hak mereka dengan cara menolak perubahan yang ditetapkan melalui gerakan perlawanan.

Jika melihat musisi-musisi di Indonesia yang juga menyuarakan kritik dalam lagunya, maka nama-nama yang muncul adalah Iwan Fals dan Slank. Iwan Fals misalnya, sejak tahun 80-an telah aktif membuat album berisi lagu-lagu yang mewacanakan kritik sosial. Sebagai seorang musisi, Ia dikenal luas sebagai solois yang kritis terhadap pemerintahan Soeharto kala itu. Beberapa lagu yang Ia rilis diantaranya yaitu lagu berjudul *Tikus-Tikus Kantor* dan *Surat Buat Wakil Rakyat* yang mengkritisi tentang budaya korupsi dan nepotisme di DPR. Kemudian Iwan Fals juga menyinggung soal pendidikan dalam lagunya yang berjudul *Oemar Bakrie*, yang berisi kritik atas rendahnya gaji pegawai negeri seperti guru. Selain itu, lagu yang sangat fenomenal dan berisi kritik soal pemerintahan yang otoriter juga ia rilis dengan judul *Bento* dan *Bongkar*. Kedua lagu yang Ia bawakan bersama grup band Swami tersebut dinobatkan sebagai lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone tahun 2009. Lagu *Bento* dan *Bongkar* menempati posisi pertama dari 150 lagu (detik.com, 2009). Berkat liriknya yang keras dan penuh dengan kritikan, lagu *Bento* dan *Bongkar* akan bisa selalu eksis di setiap zaman, serta dapat dijadikan sebagai media ekspresi dalam bentuk seni.

Selain Iwan Fals, lagu yang mengandung kritik sosial juga dibawakan oleh grup musik Slank. Slank menjadi fenomena tersendiri di dunia permusikan Indonesia, karena mereka memiliki ciri khas yang kuat dengan lagu-lagu yang sarat akan kritikan di berbagai bidang. Slank menjadi salah satu kelompok musik yang mampu

menerjemahkan realitas politik, sosial dan budaya dengan bahasa yang dekat dengan anak muda. Dibentuk pada tahun 1983, band yang digawangi oleh Bimbim, Kaka, Abdee, Ivanka dan Ridho ini masih tetap eksis hingga saat ini karena mereka mampu mempertahankan karakter musik *rock* dengan lirik-lirik yang politis. Salah satu lagunya yang cukup fenomenal adalah *Gosip jalanan*. Lagu yang dirilis pada tahun 2004 ini menyoroti praktik korupsi yang terjadi didalam institusi pemerintah. Lagu tersebut pernah dibawakan secara langsung di kantor KPK pada tahun 2008 lalu sebagai bentuk dukungan kepada KPK untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lagu tersebut sempat mendapat penolakan dari DPR yang merasa tersinggung dengan lirik yang dibawakan. Selain menyoal tentang praktik korupsi, Slank juga mengkritik beberapa golongan masyarakat dalam lagu *Gosip Jalanan* seperti bandar judi, bandar narkoba, praktisi hukum dan calon kepala daerah yang dianggap melanggar hukum dan merugikan rakyat. Tak hanya itu, lagu-lagu pada album kedelapan mereka yang berjudul *Mata Hati Reformasi* juga bercerita mengenai permasalahan sosial di Indonesia yang terjadi pada era reformasi. Bertepatan dengan momentum tumbangnya rezim Orde Baru di tahun 1998 inilah, Slank menelurkan lagu-lagu yang memiliki implikasi politis yang sarat akan kritik sosial. Album *Mata Hati Reformasi* ini kemudian mendapatkan penghargaan dari AMI (Anugerah Musik Indonesia) dengan kategori Album Rock Terbaik pada tahun 1998.

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa kritik sosial dapat diartikulasikan melalui lirik lagu yang disampaikan pada khalayak luas, dimana lagu yang dikemas bersama musik dapat membangkitkan pola perasaan seperti pengharapan, keinginan, kegembiraan, kesedihan bahkan kegilaan. Lirik lagu dapat dijadikan sebagai sarana penggambaran realitas sosial yang penting, dalam artian bermanfaat bagi manusia untuk memantau keberadaan dan hubungan relasinya dalam realitas kehidupan sosial. Pantauan yang terkait adalah perilaku, *trend*, bahkan sikap dan ideologi tertentu. Selain sebagai sarana hiburan, lagu juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau sindiran atas ketidakpuasan pada pemerintah (Kondoahi, 2013).

Berbicara mengenai *Hip-Hop*, keberadaan musik *Hip-Hop* di Papua tak lepas dari sejarah Hip-Hop di Amerika - motivasi yang melatar belakangnya dapat dikatakan serupa. Musik *Hip-Hop* pada awal mulanya digunakan oleh orang-orang kulit hitam untuk menyuarakan protes terhadap perbudakan, rasisme dan kemiskinan. Jika menilik kemunculan musik ber-genre *Hip-Hop* di dunia, secara umum musik ini diawali dari sebuah gerakan kebudayaan yang mulai tumbuh pada tahun 1970-an. Kebudayaan ini dikembangkan oleh masyarakat Afro-Amerika dan Latin Amerika. Hip-Hop merupakan sebuah musik dan subkultur yang lahir di Bronx, New York, AS, sebagai bentuk perlawanan kolektif kaum muda pos-geng terhadap tatanan dominan kekerasan geng di Bronx. Alternatif musik ini dimulai oleh seorang joki cakram keturunan Jamaika yang bernama Clive “DJ Kool Herc” Campbell disertai dengan pelopor-pelopor Hip-Hop lainnya di New York, seperti Afrika Bambaataa dan Grandmaster Flash. (Chang, 2005). DJ Kool Herc mulai mengadakan pesta bagi kaum muda pos-geng di Bronx yang hanya ingin bersenang-senang tanpa disertai dengan kekerasan geng. Inilah yang kemudian menjadi tempat kelahiran Hip-Hop. Kekerasan geng pada awalnya muncul di Bronx, utamanya di Bronx Selatan, karena maraknya kondisi kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut membuat kaum muda Afrika-Amerika, Afro-Karibia dan Latin Amerika di Bronx menjadikan kelompok-kelompok geng sebagai tempat bagi ekspresi identitas muda mereka (Chang, 2005).

Walaupun secara garis besar budaya Hip-Hop muncul di daerah Bronx, Amerika, namun tidak mudah untuk menjelaskan secara tepat apa yang menjadi pemicu munculnya Hip-Hop. Terdapat beberapa pendapat tentang hal tersebut, seperti yang dikutip dari (Jirova, 2012):

Nelson George writes in Hip-Hop America that Hip-Hop is a result of post-civil rights era in America, which he describes as “a set of cultural forms originally nurtured by African American, Caribbean American, and Latin American youth in and around New York in the ‘70s.

Dari tulisan diatas dapat diketahui bahwa kemunculan *Hip-Hop* diawali dari kejadian seperti *post-civil rights* dan di pelopori oleh orang-orang kulit hitam.

Kelahiran musik Hip-Hop ini dimulai pada tahun 1970-an dan berkembang di kalangan Afrika-Amerika dan Hispanic Amerika. Hip-Hop tumbuh sebagai bentuk protes, perlawanan, penyesalan serta kesedihan akan penindasan dan perbudakan yang dialami orang-orang kulit hitam di Amerika. Penerapan sistem rasisme juga menjadi salah satu alasan musik Hip-Hop hadir, dimana orang kulit hitam menuangkan protes mereka lewat nyanyian Hip-Hop.

Sama halnya dengan yang ada di Amerika, sebagian musisi di tanah Papua juga menggunakan musik *Hip-Hop* sebagai media ekspresi untuk menyuarakan kritik. Selain Phapin MC, beberapa musisi *Hip-Hop* Papua yang juga menyuarakan kritik tentang Papua misalnya grup musik Shesnie R.E.P yang membawakan lagu berjudul “*Mutiara*”. Lagu tersebut membawa kritik soal eksploitasi sumber daya alam di Papua. Dalam videonya di Youtube, Ia membawakan lagu tersebut lengkap dengan aksi teatrikal yang menyimbolkan kerusakan alam di tanah Papua. Musisi bernama Rand Slam juga membawakan lagu-lagu berisi kritik terhadap pemerintah dalam lagunya yang berjudul “*Ayat*”. Berikut adalah potongan lirik lagu tersebut:

*Kami mimpikan guru engkau kirimkan tentara,
Kami inginkan buku engkau pilihkan senjata
Dan serahkan emas mereka jangan serakah
Biar Papua merdeka di tanah punya mereka*

Kemudian grup musik *Hip-Hop* bernama Sabeta Papua juga membawakan lagu berjudul “*Tersenyumlah Papuaku*”, dan menyuarakan soal kemiskinan, rendahnya pendidikan dan konflik di Papua. Melalui lagu tersebut mereka juga menyatakan harapan agar keadaan di Papua bisa menjadi lebih baik lagi. Ketika meletusnya konflik bermuatan rasisme di Surabaya pada Agustus 2019 lalu, banyak musisi Hip-Hop Papua yang kemudian menyuarakan kritik serta perlawanan seputar isu tersebut melalui lagu, seperti *rapper* bernama Ecko Show feat. Lil Zi, Epo D’fenomeno dan Jacson Zeran yang membuat lagu berjudul “*#savepapua*”, 14X21 feat New Star dengan lagu berjudul “*Tolak Rasisme*” dan Rumah Kreatif Kaimana dengan lagu berjudul “*Papua Merdeka*”. Lagu-lagu tersebut adalah bentuk ungkapan

kritik mereka terhadap ketidakadilan perlakuan yang selama ini dialami oleh orang Papua.

Berbicara mengenai Papua, sampai skripsi ini dibuat masih terdapat tuntutan-tuntutan yang diperjuangkan oleh rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Menurut Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim Kajian Papua LIPI) disebutkan bahwa akar permasalahan konflik di Papua dilatarbelakangi oleh empat isu strategis, yakni (1) sejarah integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas politik orang Papua, (2) kekerasan politik dan pelanggaran HAM, (3) gagalnya pembangunan di Papua dan inkonsistensi pemerintah dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus) serta (4) marginalisasi orang Papua (Rusdiarti dan Pamungkas, 2017). Selain itu, dalam proses dibuatnya skripsi ini, persoalan tentang Papua sedang ramai-ramainya dibicarakan, terkait dengan peristiwa bermuatan rasisme dan penangkapan yang dialami oleh mahasiswa asal Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu. Peristiwa ini kemudian menjalar dan membuat banyak pihak termasuk masyarakat Papua sendiri kembali menyuarakan perlawanan dan tuntutan-tuntutan mereka terhadap pemerintah Indonesia.

Wacana-wacana perlawanan semakin banyak diangkat dalam masyarakat, utamanya setelah runtuhnya rezim Orde Baru, dimana kebebasan berpendapat akhirnya dapat dimiliki oleh setiap orang dan dijamin dalam Undang-Undang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seni musik sebenarnya hanya salah satu dari sekian banyak bentuk kesenian lainnya yang juga sama-sama menyuarakan kritik sosial. Untuk itu, fungsi seni lebih dari sekadar keindahan, namun dibalikinya juga terdapat fungsi perlawanan, karena seni berusaha untuk menggugat kemapanan dan status *quo* yang dilanggengkan oleh penguasa. Lebih dari sekadar hiburan, namun semua bentuk seni secara umum haruslah menjadi “penyambung lidah” akan berbagai persoalan sosial di sekitarnya. Karena seperti yang pernah dikatakan oleh WS Rendra dalam sajaknya yang berjudul *Sajak Sebatang Lisong: “apakah artinya berkesenian bila terpisah dari derita lingkungan?”*. Sudah jelas, bahwa kesenian tidak dapat hanya berdiri netral ditengah ketidakadilan yang menindas rakyat banyak. Ia dapat

membangkitkan dalam diri manusia rasa kemanusiaan, membawa pesan moral hingga propaganda politik.

Lagu berjudul “72” yang ditulis dan dinyanyikan oleh Mardvin Wairata – atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Phapin MC – adalah “hadiah” yang diberikan pada saat peringatan HUT Republik Indonesia yang ke “72” pada tahun 2017 lalu. Lagu tersebut sengaja dirilis bertepatan dengan peringatan HUT RI ke “72” sebagai bentuk protes Phapin MC kepada pemerintah Indonesia atas kondisi di Papua yang terpinggirkan dari wacana nasional. Dalam lirik lagu tersebut Phapin MC menyinggung soal kasus kejahatan HAM di Papua, rasisme, ekspansi kelapa sawit, penjarahan sumber daya alam, kelaparan, akses jurnalis yang dibatasi serta minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Phapin MC kerap membawakan lagu berjudul “72” dalam beberapa acara seperti *battle* di jalanan atau panggung-panggung *gigs*. Banyak penggemarnya yang menonton sembari mengibarkan bendera Bintang Kejora – simbol kemerdekaan Papua (Galuwo, 2018).

Sebagai seorang musisi, Phapin MC cukup diperhitungkan dalam dunia Hip-Hop di tanah Papua. Pengalamannya ketika menghadapi konflik SARA di Maluku – tempat kelahirannya – dan menetap di Papua mendorongnya untuk menuliskan lagu-lagu yang menyuarakan kondisi sosial di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Dalam sejarahnya, Phapin MC telah banyak menelurkan lagu-lagu yang menyuarakan kritik, tak hanya terkhusus soal Papua, namun juga kritik bagi pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Mas Phapin (sebagaimana ia biasa dipanggil), mulai tertarik mempelajari musik Hip-Hop sekitar tahun 2007-2008. Lahir di Maluku, sejak kecil ia tumbuh besar dalam lingkup konflik SARA yang merenggut banyak korban jiwa. Hingga saat dewasa ketika Phapin MC pindah ke Papua, ia juga melihat dan mengalami langsung bagaimana kondisi OAP (orang asli Papua) disana yang kemudian berpengaruh terhadap lagu-lagunya. Di Indonesia bagian Timur, ia telah mendirikan berbagai komunitas Hip-hop seperti Lorihua Hip-Hop Community, Kapzer Hip-Hop Community, Ell Dean dan Radio Fantastic Music di daerah Merauke. Beragamnya komunitas Hip-Hop yang dibangun oleh Phapin MC, telah

menjadi wadah bagi banyak musisi Hip-Hop lainnya di daerah timur untuk mulai berkarya.

Berdasarkan penjabaran diatas, disini peneliti mengupas lebih dalam mengenai lagu “72” beserta kritik yang dibawanya. Melalui lirik lagu inilah wacana-wacana kritik sosial dan politik yang ada di masyarakat dikemukakan. Studi terhadap lirik lagu dapat dipahami sebagai studi bahasa, yang menggunakan teks untuk dianalisis. Namun, bahasa yang dianalisis dengan menggunakan *critical discourse analysis* ini berbeda dengan studi linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, melainkan juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan (Eriyanto, 2012). Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif, serta menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai pisau analisis.

Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi, sedangkan analisis wacana Norman Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi yaitu *teks*, *discourse practice* dan *sociocultural practice* (Eriyanto, 2012). Lirik lagu “72” milik Phapin MC adalah teks yang menurut (Ida, 2018) termasuk kedalam analisis tekstual yang dapat diteliti dengan cara mengupas, memaknai, sekaligus mendekonstruksi ideologi, nilai-nilai atau kepentingan yang ada dibalik suatu teks media.

Menurut Sobur (2004) teks – yang dalam penelitian ini adalah lirik lagu – adalah wacanan (lisan) yang difiksasikan kedalam bentuk teks, sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana wacana dominasi dan perlawanan yang ada dibalik lirik lagu “72” milik Phapin MC ini dengan menganalisis lirik lagu melalui tiga dimensi analisis wacana kritis milik Norman Fairclough yaitu dimensi teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*.

Peneliti memilih metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough sebagai pisau analisis karena peneliti menilai bahwa metode tersebut dapat membantu peneliti dalam menganalisis produk teks dengan menggunakan tiga dimensi analisis wacana kritis yang dicetuskan oleh Norman Fairclough.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam memperkaya penelitian bertopik sama yang menggunakan metode penelitian analisis wacana kritis. Utamanya yang berkaitan dengan wacana dominasi dan perlawanan serta kritik sosial dengan medium lagu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah Indonesia dimunculkan pada lagu “72” karya Phapin MC?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

Untuk menjelaskan bagaimana wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah Indonesia dimunculkan pada lagu “72” karya Phapin MC

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai seperangkat analisis tentang penelitian berbasis analisis wacana kritis pada lirik lagu, yaitu memahami wacana yang ada dibalik suatu lirik lagu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian mengenai wacana dominasi dan perlawanan terkait dengan represi pemerintah di Papua dan menambah wawasan kritis berkaitan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di Papua.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konteks Sosial dan Politik Papua dan Indonesia

Kondisi sosial dan politik di tanah Papua – jika ditarik kebelakang – memiliki sejarah panjang pada aspek historis hingga politis. Dalam penelitian ini peneliti membawa pembaca menyelami kondisi di tanah Papua yang dimulai dari sejarah integrasi Irian Jaya di masa Hindia Belanda, pemberontakan separatisme, hingga dinamika sosial dan politik Papua saat ini. Selama periode penjajahan Hindia Belanda di Indonesia, Irian Jaya atau Papua Barat (yang saat itu bernama Netherlands/Dutch New Guinea) terus-menerus dijadikan anak tiri oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Belanda menunjukkan minatnya yang kurang di Irian Barat meskipun mereka mengakui bahwa teritori Papua memiliki posisi strategis untuk mencegah pengaruh luar masuk ke Kepulauan Nusantara (Mackie dalam Sihbudi *et.al* : 2001). Irian barat adalah tanah yang dilupakan, dan baru mendapat perhatian ketika ada pihak luar yang melirik wilayah tersebut. Pecahnya Perang Dunia II menyebabkan Belanda, atas desakan Amerika Serikat mulai memperhatikan Irian Barat karena wilayah tersebut merupakan bagian dari kepentingan strategis sekutu di Pasifik Selatan (Sihbudi *et.al.* : 2001).

Menyusul kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha mempertahankan kekuasaan dan kontrolnya atas Irian Barat. Saat itu Indonesia gagal mendapatkan kontrol atas Irian Barat selama melakukan negosiasi dengan Belanda, baik pada perjanjian Malino (1964) maupun pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag (1949). Dalam Perjanjian di Den Haag, Irian Barat tidak dimasukkan sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) dan dalam salah satu pasal dijelaskan bahwa status politik Irian Barat akan didiskusikan kembali oleh Indonesia dan Belanda dalam konteks Uni Indonesia-Belanda satu tahun setelah perjanjian. Namun pada 27 Desember 1949, residen Belanda di Irian Barat, Jan Van Eechound memproklamasikan pemisahan Irian Barat dari RIS sehingga Belanda telah melanggar persetujuan KMB pada hari yang sama ketika perjanjian dibuat.

Ketika Indonesia berupaya untuk menyelesaikan masalah Irian Barat melalui jalur diplomasi di PBB (1950-1957), Belanda mempercepat pembangunan ekonomi dan pendidikan di Irian Barat. Fasilitas dibangun, subsidi ditambah dan partai politik yang pro Belanda banyak didirikan agar Papua dapat berdiri sendiri tanpa bergabung dengan Indonesia. Pada saat itu Presiden Soekarno mencanangkan Trikora untuk membebaskan Irian Barat, yang kemudian menyebabkan perang skala kecil antara Indonesia dan Belanda. Kejadian ini menarik perhatian Amerika Serikat berkaitan dengan kepentingannya akan pengaruh Uni Soviet di Indonesia, sehingga Amerika menawarkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan di Irian Barat lewat jalur diplomatik. Akhirnya pada 5 Agustus 1962 para negosiator Indonesia-Belanda menandatangani perjanjian New York Agreement. Setelah itu Irian Barat melaksanakan pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang menghasilkan keputusan bergabungnya Irian Barat dengan Indonesia.

Setelah bergabung dengan Indonesia, permasalahan tak berhenti sampai disana. Irian Barat – yang saat ini Papua – masih merupakan “tanah yang dilupakan” ketika pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap integrasi Timor-Timur ke Indonesia pada akhir 1975. Dalam penelitian yang dilakukan oleh LIPI, disebutkan adanya faktor internal dan eksternal mengapa Papua menginginkan kemerdekaan. Dari segi internal, terdapat lima permasalahan yang masih belum terselesaikan. *Pertama*, pembangunan politik seperti pendirian partai politik, fasilitas sekolah, pengenalan atribut nasionalisme seperti bendera bintang kejora telah menumbuhkan rasa nasionalisme Papua untuk memerdekakan diri. *Kedua*, peristiwa traumatik dimana Papua mengalami kesulitan ekonomi dan berakibat pada “penjarahan” yang dilakukan oleh pejabat militer dan sipil di Irian Barat. *Ketiga*, pelaksanaan proyek transmigrasi yang membawa dampak munculnya Jawanisasi dan Islamisasi serta dianggap meminggirkan orang-orang Irian dari tanah-tanah adat mereka. *Keempat*, pengerukan kekayaan Papua oleh pemerintah pusat. *Kelima*, kecemburuan rakyat Papua terhadap perlakuan Indonesia kepada Timor-Timur, bahwa Timor-Timur diberikan hak

kemerdekaan sedangkan Papua tidak. Untuk itu sebagian kaum intelektual Papua menuntut adanya dialog terbuka dengan pemerintah pusat atas pengakuan kemerdekaan Papua.

Selain faktor internal diatas, faktor eksternal juga turut memengaruhi keinginan masyarakat Papua untuk berpisah dari Indonesia. *Pertama*, keinginan Papua untuk merdeka layaknya negara-negara Pasifik Selatan lainnya, lebih karena masyarakat Papua lebih merasa sebagai orang Melanesia dibandingkan dengan Indonesia. *Kedua*, adanya campur tangan asing, khususnya Amerika Serikat dan dualisme kebijakannya terhadap Papua. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berusaha untuk menutup jalur-jalur separatisme yang berlangsung di Papua.

Namun demikian, meskipun usaha-usaha untuk menutup dan membungkam suara masyarakat Papua banyak dilakukan, pemerintah Indonesia tidak dapat dipungkiri tetap memiliki andil dalam melakukan pembangunan di wilayah Papua. Tulisan ini tidak berarti mendiskreditkan pemerintah Indonesia seluruhnya, dengan menyatakan bahwa keputusan-keputusan kebijakan yang nyata (*real public policy decision*) itu sesungguhnya tidak ada. Tentu saja ada banyak keputusan yang kebijakan yang telah dibuat pemerintah, baik dalam bidang pangan, lingkungan hidup, energi, perumahan rakyat, pendidikan, pertahanan dan keamanan, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Menurut Herrington (dalam Andrianto, 2001) disebutkan bahwa pemerintah tentu tidak membuat kebijakan publik dalam suatu kefakuman moral. Untuk itu, hal yang perlu dikritisi adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut ketika telah turun di masyarakat Papua. Belum semua kebijakan dapat sepenuhnya membawa dampak mendasar bagi masyarakat, karena kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak mempertimbangkan masyarakat Papua sebagai *stake holder/target group* dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan yang telah diimplementasikan sejak masa Orde Baru harus diukur, dianalisis dan dievaluasi apakah tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut tercapai atau tidak. Strategi pembangunan di Papua seharusnya memang tidak hanya *top-*

down yang diperankan oleh negara, melainkan juga *bottom-up* yang diinginkan oleh penduduk lokal. Sebaiknya, strategi pembangunan harus dibarengi dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual (sesuai konteks lokal) sehingga masyarakat Papua dapat turut serta berpartisipasi menjadi bagian dari program tersebut (Andrianto, 2001).

Beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah di Papua terdapat dalam bidang administrasi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, permukiman, ketenagakerjaan hingga pemberdayaan perempuan. Perubahan juga dilakukan yaitu dengan membagi Irian Jaya kedalam 9 kabupaten: Jayapura, Yapen-Waropen, Biak-Numfor, Manokwari, Sorong, Fakfak, Paniai, Jayawijaya, dan Merauke. Namun pembangunan dan usaha penyusunan administrasi di Provinsi Irian Jaya terhambat dengan adanya pemberontakan masyarakat yang merasa kecewa dengan pemerintah. Pembangunan pada bidang pendidikan diantaranya pembangunan sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan luar sekolah, pembinaan kesenian, pembangunan sistem informasi dan sebagainya. Pembangunan bidang kesehatan yaitu seperti pelayanan rumah sakit, pemberantasan penyakit seperti malaria, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, imunisasi untuk beberapa penyakit dominan di Papua dan penyebarluasan pusat-pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Pembangunan bidang permukiman, yaitu seperti pembangunan Rumah Kampung Penataan di Raja Ampat dan Manokwari, dan pelayanan Jaminan Hidup Warga Penataan tahun 2004 (Pokja Papua, 2006). Pembangunan bidang ketenagakerjaan seperti program peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan SDM melalui pemagangan di luar negeri dan pembangunan gedung praktek bengkel mobil. Pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan yaitu dengan menjalankan program peningkatan kualitas hidup di bidang ekonomi dan organisasi serta pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak. Namun masih terdapat halangan seperti adat istiadat yang membatasi mobilitas perempuan, serta partisipasi perempuan yang masih minim pada bidang legislatif dan pemerintahan. Banyak dari mereka yang tinggal di daerah terpencil sehingga tidak dapat

mengakses sarana pendidikan, yang pada akhirnya membuat mereka tidak bersekolah dan hanya melakukan pekerjaan domestik. Walaupun begitu, bukan berarti juga tidak ada perjuangan. Para perempuan yang berada di daerah perkotaan misalnya, masih terus memperjuangkan aspirasi perempuan dengan aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan lainnya untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan penyadaran hak-hak kaum perempuan Papua dan mengembangkannya di pedalaman-pedalaman tanah Papua (Pokja Papua, 2006). Apa yang penulis sebutkan di atas masih sekelumit dari peran pemerintah dalam upayanya untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Walaupun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan dan mungkin juga penyimpangan (yang akan dibahas lebih lanjut) namun setidaknya pemerintah telah berusaha. Saat ini apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua adalah dialog dengan pembuat kebijakan yaitu pemerintah sendiri. Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, dalam membangun Papua, diperlukan pertemuan antara dua egoisme yaitu pemerintah (yang menginginkan pembangunan *top-down*) dengan masyarakat Papua (yang menginginkan pembangunan *bottom-up*).

Papua kembali menjadi sorotan publik akibat terjadinya peristiwa bermuatan rasisme dan penangkapan yang dialami oleh mahasiswa asal Papua di Surabaya pada 17 Agustus 2019 lalu. Kejadian tersebut berawal dari dugaan perusakan bendera merah putih yang dilakukan oleh mahasiswa penghuni asrama yang kemudian berujung pada adanya makian bernuansa rasialisme dan penangkapan sejumlah mahasiswa. Berdasarkan penuturan salah satu mahasiswa penghuni asrama, Dorlince Iyowau (dalam [bbc.com](https://www.bbc.com), 2019) menjelaskan bahwa mahasiswa di asrama tersebut tidak tahu menahu perihal bendera yang dirusak, mereka mengetahui hal tersebut melalui *WhatsApp* yang kemudian mereka terima. Namun demikian, aparat TNI dan kepolisian tiba-tiba datang, disusul dengan masyarakat, Ormas dan satpol PP. Menurut pengakuan Dorlince, aparat TNI kemudian mengepung dan mendobrak pagar asrama, menembakkan gas air mata dan meneriakkan kalimat-kalimat bermuatan rasisme yang cenderung menghina mahasiswa Papua tersebut.

Setelah kejadian tersebut, protes dari masyarakat Papua kemudian berbuntut panjang tak hanya di Surabaya, melainkan juga di berbagai kota di Indonesia seperti Malang, Semarang, Jakarta, Bandung, Manokwari dan Jayapura. Kejadian ini terus memanas dan aksi protes menyebar, tak terkecuali yang terjadi di Manokwari dan Jayapura.

Sebagai buntut dari penangkapan mahasiswa di Surabaya, masyarakat Papua di Manokwari melakukan aksi pada tanggal 19 Agustus 2019 yang kemudian berujung pada kerusuhan. Demonstran yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa Papua tersebut memblokir jalan dengan membakar ban di tengah jalan. Blokir dilakukan mulai dari depan Pelabuhan Manokwari hingga jalan Trikora Wosi Manokwari, Papua Barat yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat (Dhyaksa, 2019). Tak hanya Manokwari, pada tanggal 28 Agustus lalu Jayapura pun memanas, dimana masyarakat Papua melakukan aksi yang berbuntut pada kerusuhan dan perusakan sejumlah gedung. Disebutkan bahwa gedung Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Abepura rusak dibakar massa, serta Tower BTS milik PT Telkom pun tak luput dari amukan massa yang kemudian turut dibakar setelah sebelumnya diberlakukan kebijakan pemblokiran internet di Papua (Idhom, 2019).

Namun demikian, tak dipungkiri bahwa akumulasi kemarahan tersebut juga turut membawa kembali tuntutan atas referendum Papua. Ketua Gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendesak Presiden untuk mengadakan referendum bagi Papua Barat (Rosana, 2019). Hal tersebut merupakan tuntutan dari masyarakat Papua Barat, yang selama ini mengalami tak hanya persoalan rasial, namun juga ketidakadilan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Papua Barat sendiri tidak pernah merasa menjadi bagian dari NKRI. Mereka menilai bahwa Indonesia-lah yang secara ilegal menduduki Papua Barat.

Konflik yang berkepanjangan di Papua sesungguhnya membutuhkan upaya dialog, pencarian solusi dan komitmen yang tinggi dari pemerintah serta kontrol publik. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menegaskan bahwa referendum Papua sudah tidak lagi

perlu disampaikan, karena NKRI sudah final berdasarkan perjanjian New York tahun 1926 (Ul Haq, 2019). Sehingga upaya dialog dan pencarian solusi yang tepat harus segera dilakukan, agar kesalah-kaprahan penanganan atas Papua dapat segera teratasi.

Untuk itu, sebagai respons terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, sejumlah perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 September 2019 untuk menyuarakan sembilan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo yaitu (Setyawan, 2019); pemekaran provinsi lima wilayah adat, pembentukan badan nasional urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon satu dan dua di kementerian dan LPMK, pembangunan asrama nusantara di seluruh provinsi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, mengusulkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Prolegnas 2020, menerbitkan instruksi presiden untuk pengangkatan ASN honorer di Tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua, mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua serta yang terakhir adalah meminta Presiden Jokowi membangun Istana Presiden di Kota Jayapura, Papua.

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, diantara banyaknya persoalan yang dihadapi oleh rakyat Papua, pemerintah sebenarnya juga telah mengupayakan banyak hal. Pembangunan infrastruktur misalnya, yang dikebut oleh pemerintahan Joko Widodo memberikan sedikit angin segar, bahwa pemerintah sedang mengupayakan kesejahteraan rakyat Papua. Dikutip dari laman (detik.com, 2019) diungkapkan bahwa telah dialokasikan anggaran sejumlah sekitar Rp120,21 triliun untuk pembangunan infrastruktur diantaranya adalah infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman, perumahan, pembinaan konstruksi, pengembangan SDM, Penelitian dan pengembangan, pengembangan infrastruktur wilayah serta pengawasan dan dukungan manajemen. Kemudian, untuk urusan bidang peningkatan konektivitas oleh Bina Marga akan dianggarkan sejumlah Rp42,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Termasuk didalamnya pembangunan Trans Papua yang merupakan proyek lanjutan sejak era presiden

BJ. Habibie. Namun pro dan kontra pembangunan tersebut terus mengiringi, salah satunya adalah pertentangan mengenai konsep pembangunan dengan konsep adat yang masih berlaku di Papua. Pada akhirnya, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah selama ini, seperti membangun infrastruktur, masihlah belum cukup untuk meredam apalagi menyelesaikan permasalahan di Papua. Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya perlawanan di kalangan rakyat Papua, karena dominasi pemerintah di segala sektor kehidupan rakyat Papua.

1.5.2. Hegemoni, Dominasi dan Perlawanan

Konsep hegemoni pertamakali muncul dalam bahasa Yunani kuno yang disebut dengan *eugemonia*. Dalam praktiknya di Yunani, hegemoni diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh Negara-negara kota (*polis* atau *citystates*) secara individual, seperti yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (Hendarto dalam Patria dan Arief, 1999). Terminologi hegemoni kemudian berkembang dan berkontribusi besar dalam memahami relasi kuasa baik dalam relasi internasional maupun dalam lingkup suatu negara. Adalah Antonio Gramsci yang berperan besar dalam mengartikulasikan konsep hegemoni, dimana ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak hanya bergantung pada kekuatan (*force*) atau yang bersifat koersif, namun juga menekankan pada persetujuan (*consent*) (Yilmaz, 2010).

Pemikiran Gramsci akan hegemoni banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dalam hal perjuangan politik massa kelas pekerja dan masyarakat kapitalis. Selain itu, ia juga banyak dipengaruhi oleh filsafat hukum Hegel serta pemikiran politik Italia dari Machiavelli hingga Pareto. Menurut Femia (1983) perbedaan penggunaan istilah hegemoni Gramsci dari para ilmuwan sebelumnya adalah pertama, Ia menerapkan konsep hegemoni dengan lebih luas, tak hanya berbicara mengenai relasi antara kaum proletariat dan kelompok borjuis, melainkan lebih luas kepada supremasi satu kelompok atau lebih dalam setiap hubungan sosial. Kedua, Gramsci juga mengkarakterisasikan hegemoni dengan istilah “pengaruh kultural”, tidak

hanya soal “kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi” sebagaimana yang dipahami oleh generasi Marxis terdahulu.

Teori hegemoni Gramsci berangkat dari dua konsepsi yang telah disebutkan diatas yaitu tentang kekuatan (*force*) dan persetujuan (*consent*). Bagi Gramsci, kelas sosial akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui dua cara yaitu dominasi (*dominio*) atau paksaan (*coercion*) serta melalui kepemimpinan intelektual dan moral (Patria dan Arief, 1999). Gramsci mengakui bahwa dalam masyarakat akan selalu ada yang memerintah dan yang diperintah. Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsesus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Hegemoni juga berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*) dan ideologi. Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tentu memiliki sumber daya yang cukup untuk menanamkan kekuasaannya baik dengan cara koersif maupun yang bersifat ideologis. Teori hegemoni Gramsci dibangun atas dasar pentingnya kekuatan ide, karena kekuatan fisik (*coercion*) saja masih belum cukup untuk melanggengkan suatu hegemoni. Dalam bukunya *Media and Society*, Michael O’shaughnessy (2001) mendefinisikan ideologi sebagai “*a set of social values, ideas, beliefs, feelings, representations, and institutions by which people collectively make sense of the world they live in*”.

Melalui definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ideologi adalah suatu set nilai yang dimiliki sebagai pedoman dalam memandang dunia. Semua kehidupan manusia akan selalu berada dalam ideologi yang berperan besar dalam menentukan cara berperilaku, merasa dan berpikir. Tak terkecuali dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, ideologi penguasa berperan sebagai pondasi pemersatu sosial, yang membuat pihak subordinat berpikir dan bertindak dengan cara pandang tertentu yang dibuat pihak penguasa. Menurut Gramsci, agar kekuasaan dapat abadi dan langgeng maka membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja yaitu pertama, sebuah perangkat kerja yang mampu melaksanakan fungsi *law enforcement*, dimana negara dapat melakukan tindakan kekerasan dan paksaan melalui lembaga hukum, militer, polisi hingga

penjara. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat untuk patuh pada penguasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian bahkan keluarga (Heryanto, 1997). Perangkat kerja inilah yang dijalankan oleh masyarakat sipil (*civil society*) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).

Menurut Simon (1999) suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok dan gerakan-gerakan lain kedalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional. Namun Gramsci juga menekankan bahwa hegemoni penguasa tidak mencerminkan ideologi yang ada di masyarakat secara keseluruhan, karena hegemoni sesungguhnya dihasilkan dari kontestasi kepentingan pihak penguasa dengan pihak subordinat yang terus di reproduksi. Akibatnya, hegemoni dan perlawanan (*counter hegemony*) akan selalu menyertai di setiap kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Konsep hegemoni diatas juga tak dapat dipisahkan dari konsep dominasi. Konsep dominasi biasa digunakan untuk memahami persoalan absennya keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Dikutip dari laman Stanford Ecnycopedia of Philosophy (2018), disebutkan bahwa pengertian dominasi secara luas adalah “*a kind of unconstrained, unjust imbalance of power that enables agents or the conditions of their actions*”. Dalam pengertian ini, ketimpangan kekuasaan menjadi poin utama yang ditekankan. Kasus yang paling sering muncul ketika berbicasoal ketimpangan kekuasaan adalah relasi antara “tuan” dan “buruh”. Dominasi membagi masyarakat menjadi dua yaitu mereka yang memiliki kuasa dan kontrol besar (baik ekonomi, sosial dan politik), serta mereka yang dikuasai oleh pihak dominan. Masih dalam laman yang sama, disana disebutkan beberapa landasan utama mengenai apa itu dominasi. *Pertama*, dominasi serupa dengan kekuasaan, yaitu berkuasa atas orang lain. *Kedua*, dominasi mengarah pada ketimpangan kekuasaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang relasi antara “tuan” dan “buruh”.

Ketiga, dominasi memiliki banyak bentuk, seperti dominasi oleh Negara, kelompok atau golongan tertentu. *Keempat*, dalam beberapa tingkatan dominasi dapat dikatakan “*unconstrained*” atau tidak dibatasi, kapan dan bagaimana kekuasaan akan digunakan oleh pihak penguasa. *Kelima*, dominasi adalah bentuk penyelewengan kekuasaan, sehingga menyebabkan reaksi kemarahan dan kebencian dari pihak subordinat untuk melawan pihak penguasa atau institusi yang menyebabkan adanya dominasi.

Lalu siapakah yang memiliki kekuasaan besar hingga mampu mendominasi pihak lain? Dalam kaitannya dengan konteks kehidupan bernegara, maka sudah jelas bahwa pemilik kekuasaan tertinggi adalah Negara, dalam hal ini yaitu pemerintah beserta otoritasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Gramsci dalam (Patria dan Arief, 1999) bahwa dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat melalui sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari ‘roh’ ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Sehingga dalam hal ini, pemerintah memiliki peran besar sebagai pelaksana kekuasaan. Negara, dalam tulisan Althusser (2015) dipahami secara eksplisit sebagai aparatus represi. Negara adalah sebuah ‘mesin’ represi yang membuat kelas berkuasa (yang pada abad ke-19 adalah kelas borjuis) bisa memastikan dominasi mereka atas kelas pekerja. Walaupun dominasi tidak terbatas pada Negara atau institusi saja, (dominasi dapat dilakukan oleh kelompok/perseorangan atau bahkan suatu ideologi) namun gejala yang saat ini masih terlihat jelas (utamanya dalam konteks penelitian ini) adalah bentuk dominasi yang dilancarkan oleh Negara/pemerintah terhadap rakyatnya.

Sejak diperkenalkan pada tahun 1985 oleh James C.Scott, penelitian tentang teori resistensi/perlawanan telah banyak dilakukan. Studi resistensi/perlawanan banyak bersinggungan dengan studi lainnya dalam ilmu sosial dan memiliki definisi yang luas, namun secara umum resistensi/perlawanan diartikan sebagai *oppositional act* (Johansson dan Vinthagen, 2014). Dua elemen penting dari resistensi/perlawanan adalah

pertama, *sense of action* dan kedua, *sense of opposition* atau yang juga diartikan sebagai penolakan (Hollander dan Einhower dalam Karki, 2018). Dalam studi sosiologi, resistensi/perlawanan mengikutsertakan aktivitas yang sifatnya berseberangan (*opposition*) terhadap seseorang atau sesuatu yang lain. Definisi ini umum digunakan, namun James C. Scott, mengajukan definisi yang berbeda. Dalam bukunya *Weapons of the Weak* (1985) dan *Everyday Forms of Resistance* (1989), Scott menjelaskan konsep ‘*Everyday Resistance*’. Studinya yang berangkat dari penelitian terhadap petani di Malaysia menunjukkan bahwa resistensi tidak harus dilakukan secara terang-terangan dan dalam skala besar. Dikutip dalam (Lilja dkk, 2017) disebutkan bahwa:

“Everyday resistance exhibits an alternative form of resistance; one that is not as dramatic and visible as rebellions, riots, demonstrations, revolutions, civil war and other organized, collective and/or confrontational articulations of resistance (Scott 1985, 1990). ‘Everyday resistance’, something Scott interchangeably calls ‘infra-politics’, is: quiet, dispersed, disguised or otherwise seemingly invisible. He argues that, certain behaviours of subaltern groups – such as: escape, sarcasm, passivity, laziness, misunderstandings, disloyalty, slander, avoidance or theft – are tactics that they use in order to both survive and undermine repressive domination; especially in contexts where open resistance is considered too dangerous.”

Secara umum, konsep *everyday resistance* menjelaskan tentang bentuk kegiatan sehari-hari dalam masyarakat yang mencerminkan resistensi/perlawanan. Bentuk resistensi/perlawanan ini tidak mudah dikenali seperti aksi demonstrasi, namun lebih tertutup, dilakukan oleh individu dan tidak terstruktur. Dalam studinya ia menyebutkan perbuatan seperti sarkasme, bermalas-malasan, ketidakpatuhan hingga umpatan adalah bentuk resistensi/perlawanan, yang bertujuan melawan sistem dominasi yang represif. Dengan pengertian ini, James C. Scott membawa konsep resistensi/perlawanan kearah yang baru, dimana resistensi/perlawanan terintegrasi kedalam

kehidupan sosial dan merupakan bagian dari normalitas sehari-hari di masyarakat. Dengan konsep *everyday resistance*, Scott menambah khazanah baru dalam studi resistensi/perlawanan, yang sebelumnya dilihat sebagai kegiatan yang eksplisit menjadi sebuah kegiatan yang tersembunyi atau yang dalam istilah Scott *infrapolitics*. “*The existence of mundane or non-dramatic resistance shows that resistance could be understood as a continuum between public confrontations and hidden subversion.*” (Vinthagen dan Johansson, 2013). Dalam hal ini konsep *everyday resistance* dilihat lebih sebagai sebuah rangkaian antara konfrontasi publik dengan gerakan yang tersembunyi, utamanya ketika perlawanan secara eksplisit tidak memungkinkan untuk dilakukan atau terlalu berbahaya. Dalam bukunya, Scott (1985) membagi resistensi/perlawanan kedalam dua kategori, yaitu perlawanan terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tertutup (*hidden transcript*). Kedua tipe resistensi/perlawanan ini mengarah pada tiga bentuk dominasi yaitu material, status dan ideologis yang kemudian menghasilkan beragam bentuk praktik resistensi/perlawanan.

Domination and Resistance			
	<i>Material Domination</i>	<i>Status Domination</i>	<i>Ideological Domination</i>
Practices of Domination	appropriation of grain, taxes, labor, etc.	humiliation, dis-privilege, in-sults, assaults on dignity	justification by ruling groups for slavery, serfdom, caste, privilege
Forms of Public Declared Resistant	petitions, demonstrations, boycotts, strikes, land invasions, and open revolts	public assertion of worth by gesture, dress, speech, and/or open desecration of status symbols of the dominant	public counter-ideologies propagating equality, revolution, or negating the ruling ideology
Forms of Disguised, low profile, Undisclosed resistance, INFRA-POLITICS	everyday forms of resistance, e.g. poaching, squatting, desertion, evasion, foot-dragging Direct Resistance by Disguised Resisters, e.g. masked appropriations, threats, anonymous threats	hidden transcript of anger, aggression, and disguised discourses of dignity e.g., rituals of aggression, tales of revenge, use of carnival symbolism, gossip, rumor, creation of autonomous social space for assertion of dignity	development of dissident sub-cultures e.g., <u>millennial religions</u> , slave “hush-arbors,” folk religion, myths of social banditry and class heroes, world-upside-down imagery, myths of the “good” king or the time before the “Norman Yoke”

Gambar 1.5.2.1. Teori Domination and Resistance oleh James C. Scott (sumber: Scott, 1985)

Konsep yang dikemukakan James C Scott tentang *everyday resistance* tidak hanya menyoal bagaimana tindakan tersembunyi yang dilakukan oleh kelompok subordinat – atau yang dalam bukunya disebut sebagai *subaltern* – terhadap kelompok penguasa, namun konsep resistensi/perlawanan juga berhubungan dengan kekuasaan (*power*) yang melingkupinya. Mengutip pernyataan Michel Foucault (dalam Lilja dan Vinthagen, 2013) yang terkenal yaitu, “*Where there is power, there is resistance*” berarti bahwa untuk mengerti resistensi/perlawanan, maka tidak bisa terlepas dari *power* atau kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dimengerti sebagai kapasitas atau kemampuan suatu agen untuk memaksakan kehendak terhadap mereka yang lemah. Dalam pengertian ini maka kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat represif dan dimiliki oleh suatu institusi/agen. Menurut Gramsci (dalam Daldal, 2014) disebutkan bahwa:

Power resides in the complex relations of force within society. It is present and observable; it is real. This power is mainly exerted by the dominant bourgeois class through the medium of ideology: by working on the popular mentality via the institutions of civil society and thus establishing a hegemony using the State apparatuses.

Melalui definisi Gramsci tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang dimiliki oleh suatu agen, yaitu pemerintah yang dikenakan kepada rakyat lewat penyebaran ideologi melalui insitusi kemasyarakatan dan aparatus negara. Senada dengan Gramsci, Louis Althusser yang mengembangkan teori Gramsci juga berpendapat bahwa didalam setiap masyarakat terdapat suatu ideologi dominan. Ideologi dapat berupa nilai-nilai dan kepercayaan yang dibagikan oleh mayoritas masyarakat. Althusser (dalam O’ Shaughnessy, 2001) mengemukakan konsep kekuasaan yang bercokol dalam ideologi dan membagi dua jenis ideologi yaitu ISA (*Ideological State Apparatus*) dan RSA (*Repressive State Apparatus*). Keduanya menjelaskan bagaimana ideologi ditransmisikan di masyarakat, dan bagaimana masyarakat menerima nilai-nilai yang dibawa oleh kelompok dominan. ISA adalah mekanisme penanaman ideologi melalui sosialisasi, yang berusaha

meyakinkan masyarakat terhadap ideologi dominan. Sistem itu disosialisasikan melalui agen seperti sekolah, keluarga, institusi keagamaan dan media. Kesemuanya mengatur bagaimana manusia seharusnya berpikir, bertindak dan merasa. Sedangkan RSA adalah mekanisme penanaman ideologi melalui aparatus negara yang memaksa masyarakat untuk patuh terhadap ideologi dominan. Mekanisme RSA dilakukan tidak secara ideologis, namun lebih kepada kekuatan paksaan. RSA adalah institusi yang akan memberikan hukuman terhadap orang-orang yang menentang sistem dominan melalui lembaga pengadilan, militer, kepolisian dan sebagainya.

Kekuasaan (*power*) sesungguhnya memiliki banyak definisi dan dimensi, sehingga wilayah kerja kekuasaan sangatlah luas. Jika membaca sekilas teori Gramsci dan Althusser tentang ideologi dan hegemoni, kekuasaan lebih terletak pada sebuah institusi dominan, terdapat relasi kuasa dan dilakukan dari atas ke bawah. Dalam praktiknya, kekuasaan akan selalu diiringi dengan resistensi/perlawanan, karena didalamnya pasti terdapat perjuangan kelas-kelas yang terus menerus di reproduksi. Kekuasaan yang berwujud pada bentuk-bentuk dominasi tersebut kemudian melahirkan upaya resistensi/perlawanan yang ditujukan untuk melawan “kelas-kelas hegemonik” yang pada penelitian ini adalah pemerintah Indonesia.

1.5.3. Musik dan Lirik Lagu sebagai Medium Perlawanan

Perlawanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan musik. Musik saat ini memiliki daya tarik dan pesan moral tersendiri, utamanya terletak pada lirik lagu yang dibuat oleh pengarangnya. Lirik lagu sebagai salah satu unsur dari musik dapat dikategorikan sebagai puisi, seperti dalam pengertian Semi (1984) lirik adalah puisi pendek yang mengekspresikan emosi. Menurut Dallin (1994) lirik ditulis sebagai bentuk interaksi antara penulis dan pendengar. Sebagai elemen musik kedua yang esensial setelah suara, lirik lagu memberikan kontribusi yang signifikan dengan memberikan pendengarnya pemahaman yang mendalam terhadap pesan yang

dibawa dalam lagu. Pada akhirnya, lirik lagu mempertegas pesan yang ingin disampaikan dalam lagu.

Dalam hal ini pencipta lagu membawa pesan-pesan tertentu dengan tujuan memotivasi pendengar, setidaknya untuk berpikir tentang isu yang dibawakan dalam lirik lagu tersebut. Mengutip dari Dallin (1994),

“Lyrics are written as a form of interaction between the writer and the listeners. Most of the times, they carry a message (whatever that might be) with the purpose of motivating the listeners, at least, to think about it. Such a purpose and form of interaction are embedded in the cultural context of these people, according to their musical preferences, time, etc.”

Lirik lagu dilihat sebagai bahasa yang dirangkai untuk menggambarkan fenomena yang terjadi baik sosial, politik, budaya, hukum hingga pengalaman pribadi. Sebagai sebuah produk budaya, musik memiliki cara-cara yang unik dalam menyampaikan pesannya lewat lirik yang dibawakan. Jika ditarik lebih jauh lagi musik tidak hanya dipandang dalam kaca mata seni, namun juga dipandang dalam kaca mata sosial yang melingkupi pencipta teks, dalam hal ini lirik lagu. Musik dan liriknya telah menjadi diskursus dan praktik wacana dalam masyarakat, dan menurut Lull (1989) musik memiliki dua tahapan fungsi sosial. *Pertama*, musik sebagai produk ekspresif dari produsennya. *Kedua*, musik bertransformasi sebagai indikator sejarah bagi masanya.

Sebagai salah satu medium komunikasi yang memiliki fungsi ekspresi dan sosial, didalam musik dapat ditemukan pesan, ide, gagasan, pendapat bahkan kritik. Bentuk kritik yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu dapat berupa kritik sosial yang menyuarakan ketimpangan dan ketidakadilan sistem, sindiran terhadap pemerintah dan pengungkapan keadaan sosial tertentu. Isu-isu yang diangkat dapat berupa ekonomi, politik, budaya, korupsi, lingkungan, gender dan hukum. Dalam menyuarakan kritik tersebut, musik memiliki kelebihan karena musik mudah untuk didengar oleh siapa saja, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dihafal. Untuk itu dalam penelitian

ini peneliti menggunakan objek berupa lirik lagu “72” yang dinilai menggambarkan fenomena sosial di Papua sebagai produk budaya. Dari lagu tersebut, peneliti dapat melihat lebih jauh menyangkut kondisi-kondisi dominasi dan resistensi/perlawanan yang ada di Papua lewat lirik yang dibawakan.

1.5.4. Hip-Hop: Sejarah dan Perkembangannya sebagai Musik Perlawanan

Musik sebagai fungsi ekspresi dan sosial seperti yang telah dipaparkan diatas, juga berfungsi untuk menyuarakan kritik sosial yang dialami oleh suatu masyarakat. Dalam penelitian ini salah satunya adalah musik Hip-Hop, yang menjadi tren di kalangan masyarakat Papua. Banyak musisi – tak hanya musisi di Papua – yang menggunakan genre musik Hip-Hop ini sebagai media perlawanan. Hal ini sebenarnya tidak asing lagi bahkan jika dirunut dari sejarah di awal perkembangannya.

Hip-Hop sebagai musik dan subkultur lahir di Bronx Selatan, New York, Amerika Serikat sekitar pertengahan tahun 1970-an. Musik dan budaya ini muncul sebagai bentuk perlawanan anak muda terhadap kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok geng di Bronx. Pada tahun 1960 hingga 1970-an terjadi masa transisi kultural besar-besaran di Amerika Serikat. Keadaan yang tidak menguntungkan seperti ketimpangan hukum, buruknya akses kesehatan, hak-hak pemilu, kepegawaian, dan lainnya menyebabkan banyak kelompok minoritas berusaha bangkit melawan praktik rasisme dan diskriminasi yang juga marak terjadi di negara Amerika.

Hip-hop memiliki sejarah panjang berkaitan dengan *civil movement*, imigran, aksi boikot, ketimpangan sosial, rasisme dan diskriminasi. Maraknya kemiskinan dan kekerasan di daerah Bronx menyebabkan munculnya gerakan budaya – salah satunya Hip-Hop – sebagai bentuk perlawanan orang-orang kulit hitam terhadap budaya yang telah mapan.

Rap started in the South Bronx of New York, which had been a mainly black and Hispanic ghetto for decades. By 1930 nearly a quarter of the people who lived there were West Indian immigrants. And most of the Spanish speakers living in the Bronx nowadays either came originally from Caribbean islands like Puerto Rico and Cuba, or they are the children of Caribbean immigrants. The Cubans began arriving in the Bronx in the 1930s and 1940s and the Puerto Rican community goes back even further. (Devos, 2007).

Eksistensi geng di Amerika Serikat sebenarnya bermula pada sekitar tahun 1800-an, dimana geng dapat memfasilitasi kebutuhan sosial dan emosional anak-anak muda. Karena karakteristik gang yang berorientasi pada etnisitas dan golongan kelas tertentu, gang menawarkan “keluarga” kepada mereka yang tidak memiliki keluarga harmonis dan menjanjikan. Pada sejarahnya, pada kurun waktu 1940-1950-an geng menjadi pelindung remaja dan anak-anak terhadap kekerasan dan pengaruh obat-obatan terlarang. Namun pada tahun 1970-an, gang yang berada di wilayah metropolis berubah menjadi organisasi yang mengedepankan kekerasan, dengan melakukan kegiatan yang membahayakan nyawa.

Perubahan arah geng tersebut kemudian dengan cepat menyebar ke Bronx, dan inisiasi pembentukan geng terjadi pada remaja. Beberapa ritual kejahatan dan aktivitas kriminal seperti “Apache Line”, “running the mill”, “Russian Roulette” marak terjadi. Para remaja yang tergabung dalam geng biasanya akan mengajak saudara atau kerabat terdekat mereka untuk direkrut sebagai anggota geng baru.

Ditengah keterpurukan yang terjadi di kota Bronx, para pemuda yang kehilangan tempat tinggal dan dikucilkan turun ke jalanan untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri, tanpa perhatian dari keluarga. Banyak dari para remaja ini yang kemudian terpengaruh oleh perubahan sosial di lingkungannya, khususnya redefinisi keluarga. Remaja-remaja ini diidentikkan sebagai *latchkey kids* (anak-anak yang ditinggal sendirian di rumah setelah pulang sekolah karena orang tua mereka bekerja), anak-anak yang berasal dari

keluarga *broken home* atau depresi, pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, dan anak-anak yang mengalami pelecehan serta kekerasan. Untuk itu geng-lah yang pada akhirnya mampu memberikan afiliasi dan status sosial yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Geng menawarkan kredibilitas jalanan, rasa hormat diantara para anggotanya dan kepada geng lawan, hingga prestise di kalangan masyarakat. Setelah proses perekrutan selesai, maka anggota geng baru diizinkan untuk menggunakan atribut identitas geng seperti tato atau atribut lainnya yang mencerminkan identitas suatu geng tertentu.

Sebagai penanda teritorial, geng mengidentifikasi wilayah mereka dengan “*tagging*” atau meninggalkan coretan-coretan di dinding atau properti umum lainnya yang menyatakan batas geografis mereka. Pertemuan geng biasanya diadakan di bangunan-bangunan yang ditinggalkan untuk kemudian diambil alih oleh geng tersebut. Banyak para remaja anggota geng yang keluar dari sekolah dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk terlibat dalam kegiatan geng, seperti menyusun strategi, merekrut anggota, melakukan kejahatan dan bermasalah dengan hukum.

Pada tahun 1968 perang geng di Bronx mencapai puncaknya, banyak anak muda yang terbunuh, keluarga yang hancur dan kekacauan merajalela di jalanan. Pada saat itu upaya gencatan senjata paling bersejarah dilakukan sebagai reaksi atas terbunuhnya salah satu anggota geng terkenal bernama Black Benjie (Cornell Benjamin). Banyak pemimpin geng terkemuka disana hadir untuk mendiskusikan perdamaian, salah satunya adalah pioner DJ – yang akan dijelaskan lebih lanjut – bernama Afrika Bambaataa (Kevin Donovan) yang kemudian menjadi pemimpin geng Black Spades. Walaupun perselisihan tidak benar-benar hilang, para anggota geng kemudian menggunakan sarana berupa tari dan ekspresi lainnya untuk menyalurkan rasa frustrasi mereka.

Keadaan tersebut mendorong seorang DJ kelahiran Jamaica bernama Clive Kool Herc Campbell (yang saat itu pindah ke Bronx) untuk membuat musik yang dapat menyembuhkan kehidupan para remaja disana meskipun hanya untuk sesaat. Kecintaannya pada musik dan kepemilikan koleksi alat

musik yang banyak membuat ia mulai melibatkan diri untuk berkomunikasi dengan geng-geng yang ada.

DJ Kool Herc dan musiknya memang tidak serta merta dapat menghilangkan krisis geng di Bronx, namun ia telah berjasa dalam mengubah sifat geng. Bersama dengan pioner DJ lainnya seperti Grandmaster Flash (Joseph Saddler), DJ Afrika Bambaataa, DJ Breakout dan DJ Baron, hip-hop tumbuh sebagai musik dan budaya yang menawarkan “teriakan” kepada para pemimpin geng dan anggota-anggotanya untuk meninggalkan kekerasan dengan menyalurkan sisi emosional mereka pada tarian dan musik. Pada perkembangannya, DJ Kool Herc telah memicu lahirnya musik Rap dan Hip-Hop yang selanjutnya berkembang ke seluruh kota hingga dunia.

Tak hanya di Amerika, pengaruh Hip-Hop juga telah berkembang pesat dan menjadi identitas banyak anak-anak muda di Papua. Dikutip dari liputan khusus CNN Indonesia: “Hip-Hop Papua: Ko Dengar Suara Kami” pada 2019 lalu, sejarah masuknya Hip-Hop di Papua sendiri bermula sekitar tahun 2006, dimana kelompok musik bernama Star East asal Timika terbentuk dan memperkenalkan Hip-Hop di Papua. Setelah itu terbentuklah kelompok lain seperti Peace Melanesia, Antrabes, Black Nation dan Black Gangsta. Kemunculan kelompok-kelompok musik ini membuat pengaruh hip-hop masuk ke pelosok-pelosok Papua, mulai dari Jayapura, Manokwari, Sorong hingga Nabire.

Geliat Hip-Hop di Papua juga tak lepas dari akses teknologi dan informasi yang semakin terbuka. Munculnya teknologi seperti sistem komputerisasi dan teknologi rekaman, menjadikan proses pembuatan lagu lebih mudah. Dengan kemampuan standar operasi komputer serta software untuk merekam dan mengaransemen musik, musisi Hip-Hop Papua semakin terdorong untuk bereksperimen dalam membuat lagu. Meskipun demikian, peralatan yang digunakan oleh musisi Hip-Hop di Papua dalam membuat lagu masih sederhana. Ada beberapa musisi yang sudah memiliki studio rekaman sederhana, ada juga yang masih bermodalkan headset dan laptop saja. Namun meskipun berada dalam keterbatasan, musisi Hip-Hop Papua tetap terus

berkarya dengan memaksimalkan peralatan yang ada. Ironinya, musik Hip-Hop berkembang pesat di Papua, namun kebanyakan dari karya mereka tidak mendapatkan eksposur yang memadai dari pemerintah maupun media. Banyak musisi Hip-Hop Papua yang memiliki kualitas musik bagus, namun tak banyak yang tahu akan keberadaan musik mereka. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan lagu bergenre Hip-Hop yang sama fungsinya dengan Hip-Hop di Amerika yaitu sebagai bentuk resistensi/perlawanan.

1.5.5. Metode Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough

Kebudayaan Hip-Hop dengan elemen-elemennya ini kemudian menjadi bentuk ritual sosial dalam identitas budaya hip-hop dalam mengekspresikan pesan mereka. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam sebuah lagu, kritik sosial dapat muncul dan menjadi wacana yang tidak dapat dipisahkan dari studi terhadap bahasa, yang dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Lirik dalam analisis wacana kritis melihat hubungan yang utuh antara teks dengan pencipta lagu serta konteks sosial yang melingkupinya. Bahasa dalam pandangan wacana kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu maupun strategi-strategi didalamnya. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa lirik lagu dapat dianalisis dengan metode wacana kritis, karena mengandung wacana-wacana tertentu.

Analisis wacana pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk menganalisis wacana baik lisan maupun tulis, dan objek penelitian dari analisis wacana adalah bahasa. Pada awalnya analisis discourse banyak digunakan pada kajian percakapan (*conversation*), namun dalam perkembangannya analisis discourse juga digunakan untuk memahami teks tertulis atau *written texts*. (Ida, 2018).

Makna yang ada dalam suatu wacana berupa tuturan maupun tulisan merupakan bentuk praktik sosial, yang didalamnya terdapat hubungan dialektis antara unsur pengetahuan, representasi dunia dan interaksi sosial

(Fairclough, 2003). Lirik lagu merupakan teks yang memiliki wacana tertentu, sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan analisis wacana.

Berbeda dengan analisis wacana, dalam analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) bahasa tidak hanya dianalisis dari aspek kebahasaannya saja, melainkan juga dihubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan. Wacana dalam sebuah teks dilihat sebagai bentuk praktik sosial yang menghubungkan situasi, institusi dan struktur sosial yang membentuknya.

Berdasarkan itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode analisis wacana kritis untuk memahami lebih dalam dan memaknai lirik lagu dimana terdapat wacana-wacana tertentu yang sifatnya politis. Lirik lagu merupakan teks yang memiliki makna, dan digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Wacana dalam lirik lagu tidak hanya dipengaruhi oleh pencipta lagu, namun juga kondisi sosial politik yang melingkupi tempat dimana lagu tersebut di produksi.

Norman Fairclough telah menciptakan suatu metode analisis wacana kritis yang memiliki kontribusi dalam analisis sosial dan budaya, sehingga mengkombinasikan antara tradisi analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Fairclough merujuk pada penggunaan bahasa sebagai praktik sosial, lebih dari sekadar aktivitas individu untuk merefleksikan sesuatu. Bahasa dalam tradisi linguistik tradisional yang terpisah dari konteks masyarakat kemudian dihubungkan dengan praktik sosial tertentu yang melingkupi teks tersebut, sehingga peneliti merasa metode ini dapat membantu peneliti untuk menganalisis wacana dominasi dan perlawanan dalam lirik lagu “72” milik Phapin MC karena lirik lagu adalah teks yang dapat dianalisis dengan metode analisis wacana kritis. Metode analisis wacana kritis Norman Fairclough menggunakan tiga dimensi kerangka kerja yaitu *text*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*.

Dimensi pertama dari analisis wacana kritis tersebut adalah teks (*text*), yang meliputi praktik linguistik dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Fairclough juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian. Namun dalam perkembangannya, teks tidak hanya hadir dalam bentuk tulisan, namun teks dapat berupa gambar, film, video, foto, desain grafis, lirik lagu dan lainnya yang menghasilkan makna (McKee dalam Ida, 2018). Lebih jauh, teks dapat berupa realitas sehari-hari yang mempunyai atau menghasilkan makna. Teks – yang dalam penelitian ini berupa lirik lagu – tidak hanya ditelaah pada tataran linguistik, namun lebih jauh akan dikupas tentang ideologi, relasi dan identitas apa yang ditampilkan dalam teks tersebut.

Dimensi kedua dari analisis wacana kritis Fairclough adalah praktik wacana (*discourse practice*) yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Sebuah teks pada dasarnya dihasilkan melalui proses produksi teks tertentu, tergantung pada bagaimana rutinitas kerja sang pencipta teks dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan orang lainnya. Selain proses produksi yang berbeda-beda antar pencipta teks, proses konsumsi teks juga dapat berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula. Konsumsi terhadap suatu teks dapat dihasilkan secara personal atau kolektif, tergantung pada bagaimana cara mereka menikmati suatu teks tersebut. Dalam dimensi ini, memahami latar belakang historis terbentuknya sebuah teks menjadi penting, sehingga wawancara mendalam terhadap pembuat teks maupun data sekunder lainnya diperlukan.

Setelah itu, penggabungan antara temuan data pada dimensi teks dan dimensi praktik wacana digabungkan untuk kemudian menguak dimensi ketiga yaitu *sociocultural practice*. Dimensi ini berhubungan dengan konteks diluar teks, seperti konteks situasi, institusi, ekonomi hingga politik tertentu yang berpengaruh terhadap teks yang dihasilkannya.

1.6. Metodologi Penelitian

Untuk meneliti wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah dalam lirik lagu “72” dari Phapin MC, metode yang digunakan peneliti adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough. Berikut adalah penjelasan metode penelitiannya:

1.6.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah dalam lirik lagu “72” milik Phapin MC. Melalui lirik lagu tersebut peneliti melihat bagaimana wacana dominasi dan perlawanan dihadirkan. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang interpretatif dalam metodologi kualitatif (Kriyantono, 2006). Pendekatan kualitatif inilah yang selanjutnya digunakan untuk mengeksplorasi wacana dominasi dan perlawanan dalam lirik lagu “72” milik Phapin MC serta proses pembentukannya.

1.6.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis wacana kritis, khususnya analisis wacana milik Norman Fairclough. Peneliti memilih metode analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai pisau analisis karena peneliti menilai bahwa metode tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis produk teks dengan menggunakan tiga dimensi yang dicetuskan olehnya yaitu *text*, *discourse practice* dan *sociocultural practice*, yang mana dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah lirik lagu “72” milik Phapin MC. Diharapkan dengan bantuan metode tersebut tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

1.6.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah dalam lirik lagu “72” milik Phapin MC. Dalam penelitian ini lagu dianggap sebagai teks, dimana teks adalah semua yang berbentuk tulisan ataupun

visual, dan lain-lain yang menghasilkan makna. Selain itu, menurut Thwaites et al dalam (Ida, 2018) disebutkan bahwa teks adalah kombinasi dari tanda-tanda atau *signs*, dan tanda/*sign* inilah yang memproduksi makna dalam suatu teks, sehingga suatu teks berhubungan dengan teks lain yang merujuk pada sesuatu berdasarkan pada konteks atau pada budaya dimana tanda itu sendiri di produksi dan direproduksi. Konteks budaya, bahkan historis menjadi penting untuk menghasilkan makna.

Lirik lagu “72” milik Phapin MC dipilih untuk diteliti karena peneliti melihat lirik lagu tersebut sebagai teks yang dapat dimaknai, yang didalamnya terdapat wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah. Wacana dominasi dan perlawanan tersebut dapat diteliti dan dianalisis lebih dalam menggunakan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough yang meliputi tiga dimensi yaitu *teks*, *discourse practice* dan *sociocultural practice*.

1.6.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah lirik lagu “72” milik Phapin MC.

1.6.5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan memaknai pesan dalam lagu “72” milik Phapin MC secara menyeluruh. Kemudian pengamatan dilakukan untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan wacana dominasi dan perlawanan terhadap represi pemerintah yang hadir menjadi menjadi latar belakang diciptakannya kedua lagu tersebut. Peneliti juga melakukan studi pustaka terkait sejarah musik Hip-Hop di dunia, perkembangannya hingga masuk ke Papua sebagai musik untuk menyuarakan kritik sosial. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pencipta sekaligus penyanyi lagu tersebut yaitu Phapin MC via *WhatsApp messenger* untuk mengetahui motif dibalik pembuatan lagu tersebut serta latar belakang sosial kultural dimana lagu tersebut di produksi.

1.6.6. Analisis Data

Setelah data terkumpul peneliti menarasikan lirik lagu tersebut beserta data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan interpretasi teks. Setelah itu peneliti melakukan intertekstualitas, yaitu menghubungkan lirik lagu dengan teks lainnya berupa literatur dan referensi terkait untuk melihat keseluruhan wacana yang ada.